

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN *NGAWEN* DI
KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Oleh

M. Berita Ary Sutha, NIM. 1714101022

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas dari kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji dengan cara mengkaji objek berupa peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat atau yang diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Sehingga hasil yang diperoleh berupa analisis mengenai pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini yaitu, (1) pengaturan mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan bagi yang tidak memiliki izin yang terdapat di dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas mengenai kegiatan *Ngawen* di Kabupaten Jembrana dikarenakan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2016 tentang Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk dapat memanfaatkan dan mengelola hutan.

Kata Kunci: *Ngawen*, Perkebunan Dalam Hutan, Pengaturan, Akses Legal.

**JURIDICAL REVIEW OF NGAWEN'S ACTIVITIES IN JEMBRANA ACT
NUMBER 18 OF 2013 ON THE PREVENTION AND ERADICATION OF
FOREST DESTRUCTION**

By

M. Berita Ary Sutha, NIM. 1714101022

Law Department

ABSTRACT

This study aims to determine (1) the regulation of Ngawen activities in Jembrana Regency in the perspective of Law Number 18 of 2013 concerning Forest Destruction Prevention and Eradication, (2) the basis for consideration of the legality of Ngawen activities in Jembrana Regency. The type of research used is normative-empirical legal research that examines objects in the form of statutory regulations or legal norms that apply in society or that are applied to a particular legal problem by using a statutory approach, a case approach and a historical approach. So that the results obtained are in the form of an analysis regarding the regulation of Ngawen activities carried out by the forest control village community in Jembrana Regency. The results of this study are (1) the regulation regarding Ngawen activities in Jembrana Regency is that there is a prohibition for everyone to carry out plantation activities in the forest area for those who do not have the permits contained in Article 17 Paragraph (2) letter b of Act Number 18 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, (2) the basis for legal considerations regarding Ngawen activities in Jembrana Regency due to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.38 / MENLHK / SETJEN / KUM / 10/2016 concerning Social Forestry which provides legal access to forest communities to be able to utilize and manage forests.

Keywords: *Ngawen, Plantation in Forest, Regulation, Legal Access.*